



**Judul** : Ngebet Pengin Gedung Baru: Wow, DPR Bela-Belain Bikin Kunker Ke Jerman  
**Tanggal** : Sabtu, 02 September 2017  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Ngebet Pengin Gedung Baru

# Wow, DPR Bela-belain Bikin Kunker Ke Jerman

DPR terlihat begitu ngebet pengin gedung baru. Saking ngebetnya, di September ini, rombongan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bakal terbang ke Berlin, Jerman, untuk membandingkan gedung parlemen di negara itu dengan yang ada di Indonesia.

WAKIL Ketua BURT DPR Hasrul Azwar beralasan, kunjungan kerja (kunker) tersebut sudah dirancang sejak lama. Kunjungan itu merupakan kelanjutan dari kunker BURT ke Amerika Serikat yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Sudah (lama direncanakan). Sudah dari tahun lalu direncanakan. Kebetulan saja ini momennya sama. Jadi lebih seksi gara-gara ada rencana pembangunan gedung," ucap politisi senior PPP ini.

Tujuan utama kunker itu,

klaimnya, bukan dalam rangka pembangunan gedung baru. Kunjungan itu untuk melihat penataan kompleks parlemen yang dilakukan Jerman.

"Untuk melihat bagaimana penataan parlemen di sana. Penataan, pelayanan gedungnya, kenyamanannya, pelayanannya kepada tamu yang datang, keamanannya, fasilitasnya," cetusnya.

Untuk jumlah personel yang berangkat, Hasrul mengaku belum tahu. Demikian juga soal tanggalnya. Dia hanya tahu durasi

waktu kunjungan itu. "(Kunker dilakukan) seminggu. Sekaligus kunjungan kerja," ucap dia.

Di tempat terpisah, Ketua BURT Anton Sihombing mencoba meyakinkan masyarakat bahwa penataan gedung baru akan dilakukan secara transparan dan penuh perhitungan. Kata dia, Setjen DPR, selaku pengguna anggaran, akan selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Setjen DPR juga akan menjalankan semua rekomendasi yang diberikan Kementerian PUPR.

Sejauh ini, kata dia, rekomendasi atas kajian dari Kementerian PUPR sudah diterima Setjen DPR. Kajian itu kemudian dibahas secara transparan antara BURT dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan Perencanaan Pem-

angunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

Anton menyebut, hasil pembahasan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui surat resmi. "Di sini terbuka. Bandingkan dengan kementerian lain, dianggarkan Rp 500 miliar hanya Kepala Biro dan Dirjen," klaimnya.

Dalam Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat meminta DPR untuk mendengarkan aspirasi rakyat soal pembangunan gedung baru. Alasannya, berbagai penolakan muncul dari masyarakat atas rencana tersebut.

Meski begitu, Anton tidak mengangap ucapan Sri Mulyani itu sebagai bentuk ketidaksetujuan dengan pembangunan gedung baru DPR. Dia pun meng-

klaim, Sri Mulyani sudah setuju dengan usulan pembangunan gedung baru DPR. Alasannya, pembangunan itu terbilang mendesak.

"Persoalan karena butuh. Masa kalian enggak malu gedung sudah begitu? Gedung bukan untuk kami, tapi untuk DPR berikutnya," cetusnya.

Dia kemudian mengungkit-ungkit mengenai kapasitas gedung. Menurutnya, Gedung Nusantara I, yang saat ini dipakai sebagai kantor utama anggota DPR, hanya dirancang untuk menampung 800 orang. Namun, saat ini yang berkantor di Gedung Nusantara I sudah sampai lima kali lipat dari kapasitas itu.

"Gedung itu dibangun untuk kapasitas 800 orang. Sekarang, ada 4.000 orang," cetusnya. ■ RMOL/NET